



PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2009



PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2009



PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2009



PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2009

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan nasional dalam 5 tahun ke depan pada kurun waktu 2010-2014. Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada capaian hasil (UU No. 17 tahun 2003). Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang sistematis dan terstruktur. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu pedoman penulisan RPJMN 2010-2014 yang sejalan dengan upaya penyempurnaan struktur program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan menjadi bagian penting dari RPJMN 2010-2014 tersebut.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk penyusunan dokumen RPJMN 2010-2014, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis, konsisten dan koheren. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dapat dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Jakarta, 27 Maret 2009

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

H. Paskah Suzetta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Penjelasan Umum	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Tujuan	3
1.4	Tahapan Penyusunan RPJM Nasional	3
1.5	Alur Penyusunan Rancangan Kebijakan dan Indikatornya	5
	1.5.1 Kerangka Permasalahan dan Arah Kebijakan	5
	1.5.2 Penyusunan Struktur Kebijakan (<i>Policy Structure</i>)	7
1.6	Pendekatan Koordinasi	9

BAB II SUBSTANSI DAN STRUKTUR PENYUSUNAN RPJMN 2010-2014

2.1	Substansi RPJM Nasional 2010-2014	10
	2.1.1 Arahan RPJPN 2005 - 2025	10
	2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	11
	2.1.3 Pengarusutamaan Pembangunan (<i>Mainstreaming</i>)	13
	2.1.4 Kerangka Ekonomi Makro	13
2.2	Buku RPJM Nasional 2010-2014	13
	2.2.1 Outline Buku I : Prioritas Pembangunan Nasional	15
	2.2.2 Outline Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang/K-L	17
	2.2.3 Outline Buku III : Aspek Pengembangan Wilayah	20
2.3	Kaidah Pelaksanaan	21

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMN 2010-2014

3.1	Penjelasan Umum	22
3.2	Kriteria Indikator Kinerja	24
	3.2.1 Indikator Kinerja Yang SMART	24
	3.2.2 Indikator Kuantitatif dan Kualitatif	25

3.2.3 Indikator Proksi	26
3.3 Pendekatan Penentuan Indikator Kinerja	26
3.3.1 Logika Berpikir Induktif	26
3.3.2 Logika Berpikir Deduktif	27
3.4 Penjelasan Struktur Kebijakan dan Indikator Kinerja	28

LAMPIRAN:

Contoh Penyusunan Struktur Kebijakan (<i>Policy Structure</i>) dan Indikator Kinerja	30
--	----

ooo000ooo

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Diagram Alir Perumusan Masalah dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014	6
Gambar	1.2	Struktur Kebijakan dan Kinerja Pembangunan RPJMN 2010-2014	8
Gambar	2.1	Keterkaitan Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang	14
Gambar	3.1	Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Sistem Pemerintahan	22
Gambar	3.2	Indikator Outcomes Adalah Beberapa Indikator Output Terpenting	26
Gambar	3.3	Indikator Outcomes dalam Bentuk Data Sekunder Hasil Survey (Indeks)	27

ooo000ooo

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional	16
Tabel	2.2	Matriks Rencana Tindak Prioritas Bidang	19
Tabel	2.3	Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah K-L	19
Tabel	2.4	Matriks Rencana Tindak Program Lintas KL Perwilayah Pulau	21
Tabel	3.1	Merumuskan Indikator yang Memenuhi Kriteria SMART	24

ooo000ooo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan. RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada kinerja. Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya.

Perumusan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dari setiap tahap kebijakan pembangunan merupakan bagian yang penting dalam perumusan RPJMN 2010-2014. Keberhasilan pencapaian sasaran pada setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target-target yang direncanakan. Melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan

bagi proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berikutnya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Panduan penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini dilandasi oleh berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan tentang reformasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yang berbasis informasi kinerja atau *Performance-Based Budgeting*.
2. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencanangkan bahwa rangkaian kegiatan pembangunan direncanakan dalam kurun periode jangka panjang (RPJP-20 tahun), Jangka Menengah (RPJM-5 tahun), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025, adalah perumusan rencana strategi perencanaan pembangunan periode 20 tahun untuk melaksanakan tugas pembangunan berkelanjutan mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan bingkai azas otonomi daerah dengan pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.
5. Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menjelaskan lingkup pengukuran kinerja pelaksanaan rencana pembangunan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.
6. Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar dan acuan dalam merumuskan ketentuan umum, definisi dan istilah yang digunakan dalam perumusan RPJM Nasional.

1.3 TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang disusun dengan alur logika yang strategis, konsisten dan koheren. Diharapkan, dokumen RPJMN 2010-2014 mudah dipahami dan dioperasionalkan, sehingga mendukung upaya reformasi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yang berbasis kinerja.

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM NASIONAL

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, koordinasi penyusunan RPJM Nasional dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada peraturan tersebut di atas, tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

1. **Penyiapan Rancangan Awal RPJMN.** Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional dimulai pada tahun terakhir RPJM Nasional yang berjalan, dengan mengacu pada RPJP Nasional, visi/misi dan program prioritas presiden terpilih, dan berdasarkan pada rancangan rencana pembangunan teknokratik yang telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN berjalan serta aspirasi masyarakat. Rancangan Awal RPJMN disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam sidang Kabinet dan menjadi pedoman/acuan bagi penyusunan Rancangan Renstra K-L.
2. **Penyiapan Rancangan Renstra K-L.** Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra K-L yang diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya. Rancangan Renstra K-L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional. Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional

di sektornya.

3. **Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra KL.** Setelah proses konsultasi Sidang Kabinet dari Pemerintahan Presiden terpilih yang baru, dihasilkan Rancangan RPJM Nasional. Rancangan RPJM Nasional memasukkan pertimbangan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra K-L. Rancangan Renstra K-L ditelaah oleh Menteri PPN/Bappenas agar konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Nasional, dan sasaran program prioritas Presiden sesuai dengan sasaran tujuan KL serta tugas yang dilaksanakan oleh pusat-daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. **Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.** Proses konsultasi publik dan sosialisasi dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Jangka Menengah yang mengikutsertakan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Musrenbangnas Jangka Menengah diselenggarakan paling lambat 2 bulan setelah Presiden dilantik.
5. **Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional.** Rancangan Akhir RPJM Nasional yang disusun berdasarkan hasil Musrenbangnas, kemudian dikonsultasikan pada DPR dan Sidang Kabinet untuk penyempurnaan.
6. **Penetapan RPJM Nasional.** Rancangan Akhir RPJM Nasional yang telah disempurnakan kemudian diproses untuk ditetapkan menjadi RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

1.5 ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN INDIKATORNYA

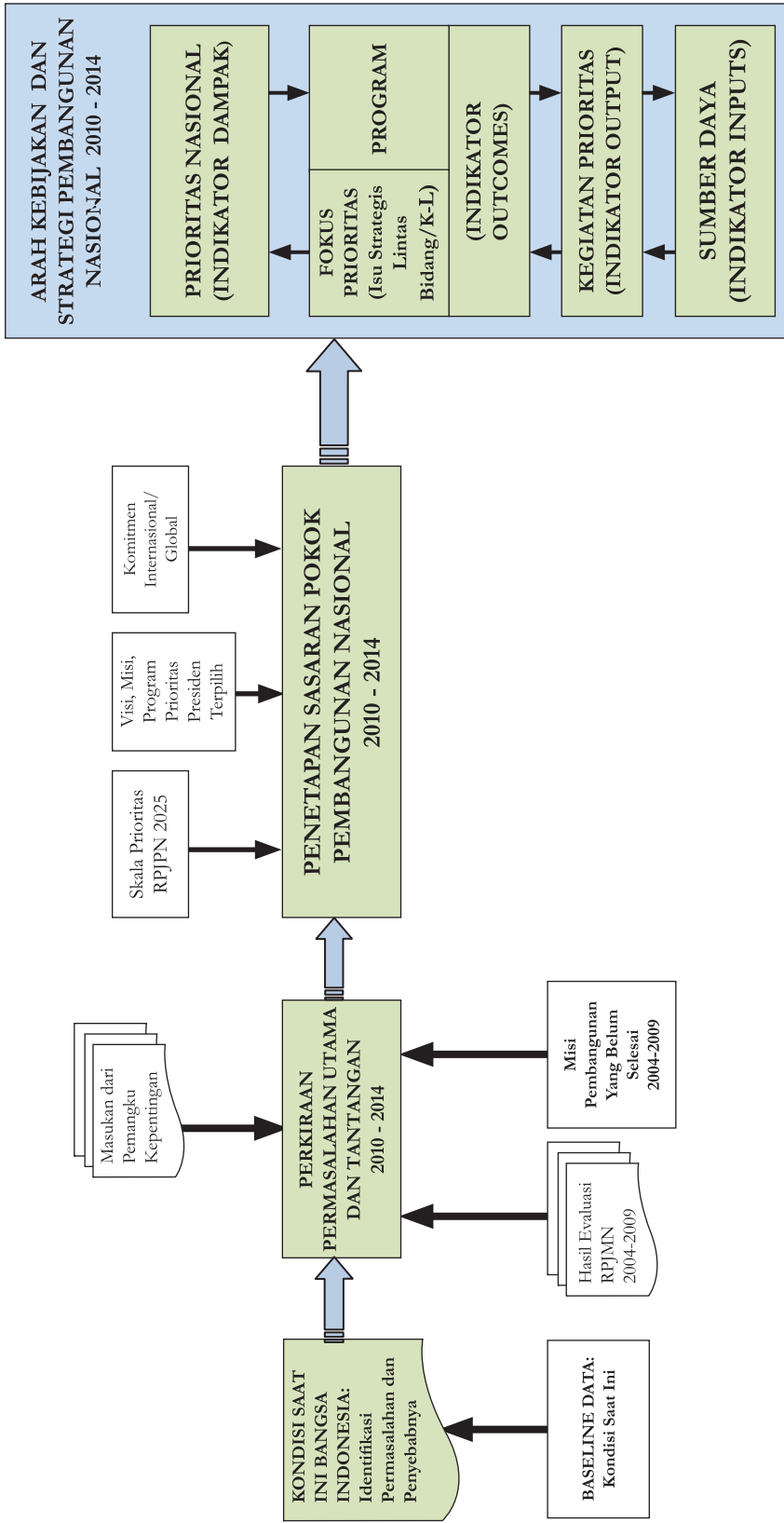
1.5.1 KERANGKA PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan arah kebijakan pembangunan nasional dimulai dengan identifikasi prakiraan permasalahan utama, serta penyebabnya untuk diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan utama merupakan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi lima tahun kedepan berdasarkan perkembangan sampai saat ini. Permasalahan utama termasuk tantangan, yang merupakan permasalahan yang menonjol dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, ditetapkan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2010-2014, yang akan menjadi dasar penetapan Prioritas Pembangunan Nasional. Untuk setiap Prioritas Pembangunan, dibangun skenario isu strategis bersifat lintas Bidang/K-L dan kegiatan pembangunan yang akan mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut. Yaitu melalui Fokus Prioritas Nasional (program-program pembangunan Prioritas yang bersifat lintas Bidang/K-L atau lintas wilayah), dan kegiatan-kegiatan prioritas nasional pendukungnya.

Berbagai acuan yang dapat digunakan dalam identifikasi prakiraan permasalahan utama bangsa dalam periode lima tahun ke depan, adalah: (1) hasil evaluasi RPJMN periode sebelumnya, (2) misi pembangunan yang belum terselesaikan dalam periode 5 tahun sebelumnya, dan (3) masukan aspirasi dari masyarakat/*stakeholder* luas lainnya. Selanjutnya, permasalahan dan sasaran akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan pembangunan nasional yang perlu ditetapkan untuk periode 2010-2014, dengan mempertimbangkan dan mensinergikan hal-hal sebagai berikut:

1. Skala Prioritas dalam RPJPN 2025
2. Visi, misi dan Program Prioritas Presiden Terpilih
3. Komitmen internasional/global terkini

Logika alur berpikir dalam merumuskan permasalahan pokok dan agenda pembangunan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan pendekatan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 Diagram Alir Perumusan Masalah dan Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014.



Gambar 1.1
 DIAGRAM ALIR PERUMUSAN MASALAH & ARAH KEBIJAKAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014

1.5.2 PENYUSUNAN STRUKTUR KEBIJAKAN (*POLICY STRUCTURE*)

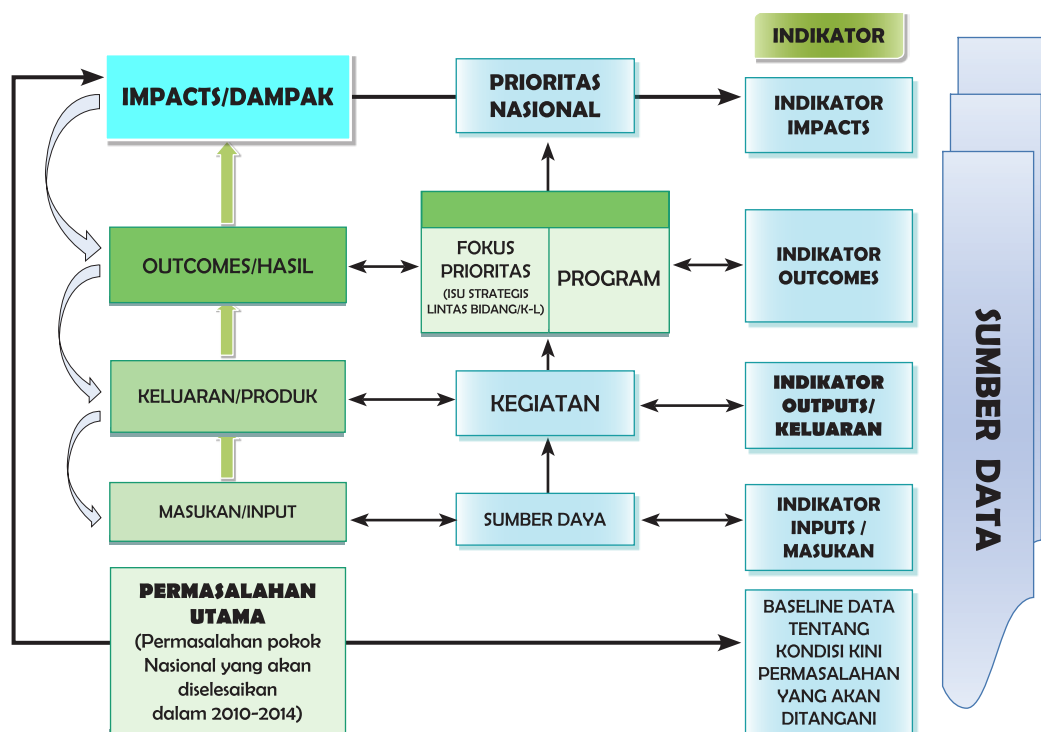
Di dalam perumusan kebijakan pembangunan (*policy planning*), perlu dijaga logika berpikir yang konsisten antara identifikasi permasalahan dan tantangan, sasaran, dan arah kebijakan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas (*policy structure*) haruslah dituliskan secara sistematis dan terstruktur, yaitu mengalir dalam keterkaitan yang logis sehingga memudahkan untuk dipahami dan dapat dievaluasi kinerja capaiannya. Hal ini juga akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kerjanya.

Penyusunan *Policy Structure* dilakukan menggunakan model logika program (*program logic model*) atau dapat juga disebut model logika kinerja (*performance logic model*). Yaitu, kerangka logika yang mengkaitkan berbagai tahapan/kegiatan dan memberikan cetak-biru/pemetaan untuk pencapaian misi suatu program. Aplikasi penyusunan kerangka logis struktur kebijakan di dalam RPJMN dapat dilihat dalam Gambar 1.2 Struktur Kebijakan (*Policy Structure*) dan Kinerja RPJMN 2010-2014. Model logika membantu untuk menjelaskan objektif/tujuan dari kebijakan/program, dan aliran kontribusinya dalam rantai pencapaian hasil kinerja berdasarkan setiap tahap kebijakan.

Tahap perumusan rancangan struktur kebijakan (*policy structure*) dimulai dengan identifikasi kondisi saat ini, yaitu permasalahan yang harus ditangani untuk menuju pada perubahan (sosial/ekonomi/politik/fisik) yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya ditetapkan sasaran pokok dari perubahan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada sasaran pokok yang akan dicapai, ditentukan arah kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan pembangunan yang memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja terdiri dari Prioritas, Fokus Prioritas/Program, dan Kegiatan untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas.

Pencapaian Prioritas Nasional didukung oleh Fokus Prioritas yang sejauh mungkin bersifat lintas Bidang/K-L beserta kegiatan-kegiatan prioritasnya. Untuk setiap rantai hasil/pencapaian digunakan berbagai indikator untuk mengukurnya. Untuk keberhasilan pencapaian Prioritas Pembangunan diukur dengan indikator *impact/dampak*, keberhasilan pencapaian Fokus Prioritas atau Program diukur

dengan indikator *outcomes*/hasil, keberhasilan pencapaian Kegiatan diukur dengan indikator *output*/keluaran, sedangkan untuk penggunaan sumberdaya digunakan indikator input.



Gambar 1.2

Struktur Kebijakan (*Policy Structure*) dan Kinerja Pembangunan RPJMN 2010-2014

Pengertian dari masing-masing rantai pencapaian kinerja/ indikator kinerja kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Dampak/*Impact*: Pernyataan perubahan pada masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai akibat dari hasil pembangunan yang tercapai. Biasanya bersifat Jangka Menengah/Jangka Panjang.
2. Hasil/*Outcome*: Pernyataan manfaat yang ingin dicapai, atau hasil *tangible* bagi masyarakat/*target group*. Merupakan cara untuk menentukan dan mengendalikan tercapainya sukses/tidaknya suatu Fokus Prioritas/Program. Outcomes dapat juga merupakan perubahan yang terjadi pada target group—yang merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas (sebagai

- dampaknya).
3. Keluaran/*Output*: Apa saja yang harus dihasilkan/dilakukan untuk mencapai Outcome Antara/Outcome Akhir.
 4. Masukan/*Input* : Sumber daya yang diperlukan sehingga kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan *output* bisa berjalan.

1.6 PENDEKATAN KOORDINASI

Untuk setiap tahap kebijakan pembangunan dapat ditunjuk koordinator Prioritas dan koordinator Fokus Prioritas, yang memerlukan koordinasi lintas Bidang/K-L dan Kewilayahan. Koordinasi diperlukan dalam dua (2) tahap, yaitu: (1) Tahap Perencanaan, dan (2) Tahap Pelaksanaan. Di dalam proses penyusunan tiga (3) buah buku RPJMN, masing-masing buku memiliki Koordinator Buku. Untuk Buku I, Prioritas dan Fokus Prioritas Nasional, berlaku sebagai koordinator adalah Bappenas, yaitu Deputi yang terkait dengan suatu tema Prioritas Nasional tertentu. Untuk Buku II setiap Bidang diketuai oleh Koordinator Bidang yang merupakan Deputi Bidang yang terkait. Selanjutnya, untuk Buku III diketuai oleh Deputi yang terkait dengan bidang pembangunan daerah. Di dalam tahap pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan, koordinator Prioritas Nasional dan Fokus Prioritas Nasional dapat dipilih, diantara: (1) K-L yang dominan kegiatannya, (2) Kementerian Koordinator, atau (3) Bappenas.

Koordinator Prioritas Nasional akan berkoordinasi dan membangun kesepakatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional dengan para Koordinator Prioritas Bidang di lingkup Prioritas Nasional bersangkutan. Koordinator Fokus Prioritas Nasional bertanggung-jawab untuk merumuskan Kegiatan Pokok/Prioritas Nasional dengan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran/*outcome* Fokus Prioritas Nasional agar seluruh proses perencanaan merupakan kegiatan yang strategis, konsisten dan koheren. Tugas dari Koordinator adalah memastikan lingkup substansi Kegiatan Prioritas dalam Prioritas Nasional terkait, tersedianya indikator kinerja yang sesuai, dan membangun kesepakatan dalam pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

oooOOOooo

BAB II

SUBSTANSI DAN STRUKTUR PENYUSUNAN RPJM NASIONAL 2010-2014

2.1 SUBSTANSI RPJM NASIONAL 2010-2014

2.1.1 ARAHAN RPJPN 2005 - 2025

Tujuan (visi) dari Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Visi pembangunan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan arah pencapaiannya melalui delapan (8) misi pembangunannya, yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan, (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pencapaian sasaran pokok RPJPN 2005-2025 pada masing-masing misi pembangunan tersebut, dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas pembangunan pembangunan jangka menengah. Untuk setiap misi pembangunan tersebut, di dalam setiap tahap rencana pembangunan jangka menengah dijabarkan arah pembangunan dan sasaran pokok 5 tahunannya. Tahapan pembangunan dalam RPJP Nasional adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--|
| RPJM 1
(2005-2009) | Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. |
| RPJM 2
(2010-2014) | Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian. |

- RPJM 3 (2015-2019)** Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.
- RPJM 4 (2020-2025)** Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

RPJMN 2010-2014 merupakan tahap ke-2 pencapaian visi dan misi RPJPN 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Pencapaian tahapan RPJP dilaksanakan melalui strategi pembangunan yang dipilah dalam sembilan (9) Bidang Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, yaitu: (1) sosial budaya dan kehidupan beragama; (2) Ekonomi, (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Politik, (5) Pertahanan dan Keamanan, (6) Hukum dan Aparatur, (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan (9) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Untuk penulisan RPJMN 2010-2014 pembagian Bidang mengikuti pembagian 9 bidang pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 ditambah satu bidang yaitu Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan. Bidang ini nantinya dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari Bidang Ekonomi

2.1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran, yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Indikator pengukuran keberhasilan pencapaian Prioritas Nasional adalah Indikator Dampak/*Impact*. Untuk setiap Prioritas Nasional dijabarkan ke dalam Fokus Prioritas yang bersifat isu strategis Lintas Bidang/K-L. Indikator

pengukuran keberhasilan Fokus Prioritas adalah indikator outcomes.

Prioritas Nasional adalah penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2010-2014 yang telah dicanangkan semenjak masa kampanyenya. Pencapaian prioritas nasional bersifat lintas pelaku pembangunan yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara umum, intervensi Pemerintah untuk mencapai Prioritas Nasional dilakukan: Pertama, melalui kebijakan atau regulasi, dan kedua, melalui kebijakan anggaran. Arahan prioritas RPJP-tahap 2 tersebut merupakan salah satu rujukan dalam penentuan agenda Prioritas baik di lingkup nasional maupun dalam lingkup Bidang/K-L. Pada tahap penyiapan Rancangan Awal RPJMN (teknokratis) Prioritas Nasional disusun berdasarkan :

1. Prioritas dalam konteks sasaran RPJP 2005-2025 tahap ke-2 yaitu RPJMN periode 2010-2014 dan Prioritas terkait dengan kondisi saat ini.
2. Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Terpilih, yang merupakan agenda nasional utama yang perlu mendapat dukungan dan menjadi prioritas keberhasilan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan;
3. Komitmen internasional/global yang terkini; dan
4. Kebijakan pembangunan prioritas pada tahap RPJMN 2004-2009 yang belum tuntas penyelesaiannya serta perlu untuk diteruskan dalam periode selanjutnya.

Prioritas Nasional kemudian dijabarkan menjadi isu strategis lintas Bidang/ K-L atau disebut Fokus Prioritas Nasional. Fokus Prioritas Nasional adalah kebijakan lintas Bidang/K-L yang di rancang untuk mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Sasaran atau tujuan dari Fokus Prioritas Nasional dicapai melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan Prioritas lintas Bidang/K-L.

Mengacu pada sasaran Prioritas Nasional, pada setiap Bidang dirumuskan Prioritas Bidang dan Fokus Prioritas Bidang yang didukung oleh masing-masing Kegiatan Prioritas Bidang. Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk mencapai Sasaran Pokok pembangunan Bidang yang dicanangkan dalam periode 5 tahun kedepan. Fokus Prioritas Bidang bersifat lintas sektor/K-L sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor/K-L.

2.1.3 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN (MAINSTREAMING)

Pengarusutamaan pembangunan (*mainstreaming*) adalah isu/permasalahan yang melibatkan kegiatan lintas Bidang dan atau lintas K-L. Pengarusutamaan pembangunan dimaksudkan untuk mengintegrasikan suatu isu ke dalam proses pembangunan di setiap Bidang dan atau Kegiatan. Pengarusutamaan terintegrasi ke dalam Kegiatan-Kegiatan lintas Bidang dan atau K-L dalam bentuk indikator output untuk isu pengarusutamaan tertentu. Pengarusutamaan menjadi landasan operasional pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Penerapan pengarusutamaan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Untuk memastikan pelaksanaan pengarusutamaan di Bidang dan atau Kegiatan pembangunan, perlu ditunjuk Koordinator untuk masing-masing isu pengarusutamaan. Koordinator bersama dengan unit pelaksana terkait menyepakati rencana tindak dan indikator capaian output yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing Kegiatan di dalam Bidang yang terkait. Masing-masing unit pelaksana berkewajiban untuk melaporkan capaian pengarusutamaannya yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Koordinator Pengarusutamaan.

2.1.4 KERANGKA EKONOMI MAKRO

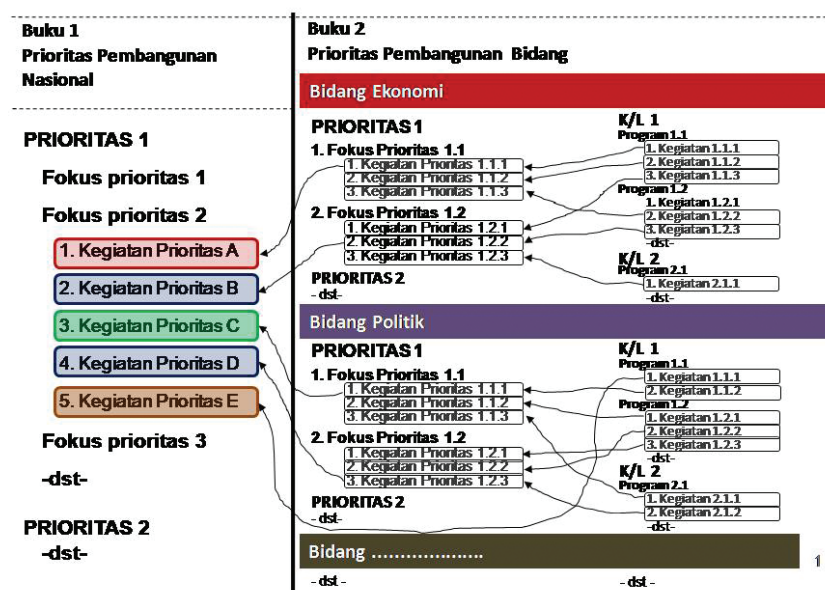
Rumusan strategi pembangunan nasional yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pembiayaan menjadi bahan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah. Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah 2010-2014.

2.2 BUKU RPJM NASIONAL 2010-2014

RPJM Nasional 2010-2014 terdiri dari tiga (3) buah buku yang saling terkait. Buku I RPJMN memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yang bersifat Nasional. Buku I mencerminkan Platform Presiden sehingga Prioritas dan Fokus Prioritas dapat bersifat lintas bidang dan atau sama dengan Prioritas dan Fokus Prioritas Bidang.

Buku II RPJMN memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang. Secara singkat Buku II ini terdiri dari Kondisi Umum, Permasalahan dan Sasaran, serta Arah Kebijakan Pembangunan Bidang. Arah kebijakan Pembangunan Bidang memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas bidang. Kerangka pikir/kerja terdiri dari Prioritas dan Fokus Prioritas Bidang. Prioritas dan Fokus Prioritas Bidang sejauh mungkin bersifat Lintas Sektor/K-L dan dimungkinkan satu bidang memiliki lebih dari satu prioritas. Uraian yang bersifat lintas sektor/K-L tersebut jika diperlukan dapat dilengkapi dengan uraian sektor.

Buku I memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Nasional sesuai dengan Platform Presiden. Prioritas dan Fokus Prioritas Nasional dapat bersifat hubungan bidang. Sementara Buku II memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang. Seandainya ada Kegiatan bukan Prioritas diputuskan menjadi Kegiatan Prioritas Nasional, maka pada iterasi berikutnya Kegiatan tersebut dimasukkan menjadi Kegiatan Prioritas Bidang. Hubungan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang

Buku III berisi rencana pengembangan wilayah pulau, dan keterkaitan Nasional-Regional yaitu melihat strategi kebijakan pembangunan Bidang/K-L dalam

mendukung pencapaian prioritas nasional di wilayah. Buku III merumuskan rencana pembangunan Bidang/K-L untuk mendukung arah pengembangan pulau dengan basis wilayah Propinsi. Sehingga, secara komprehensif dapat terlihat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota..

2.2.1 OUTLINE BUKU I : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I : KONDISI UMUM

1.1 Pencapaian Pembangunan

Merupakan gambaran perkembangan pembangunan nasional sampai saat ini disertai dengan pencapaian yang telah dihasilkan (pernyataan dalam besaran indikator dampak). Pengantar terhadap permasalahan nasional yang akan dihadapi berkaitan dengan Sasaran Pokok dalam RPJPN.

1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berisi uraian mengenai permasalahan nasional yang akan dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan sasaran prioritas nasional yang akan dicapai. Sasaran menggunakan indikator dampak.

BAB II : ARAHAN RPJPN 2005 – 2025

BAB III : KERANGKA EKONOMI MAKRO

Merupakan rumusan strategi pembangunan nasional yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pembiayaan. Memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah 2010-2014.

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kebijakan pembangunan nasional bersumber dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden.

4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Berisi arah kebijakan pembangunan nasional 2010-2014 yang memuat strategi pembangunan berupa struktur kebijakan (*policy structure*) dalam rangka memecahkan permasalahan dan sasaran pokok.

Dilengkapi dengan Matriks Lampiran Buku I berisi Prioritas, Fokus Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional.

4.2 Strategi Pembangunan Kewilayahan

Memberikan arah kebijakan untuk pembangunan Sektoral dan Kewilayahan.

4.3 Pengarusutamaan Pembangunan

Menjelaskan isu/permasalahan yang menjadi pengarusutamaan pembangunan dan melibatkan lintas Bidang/K-L. Dilengkapi dengan Matriks Lampiran rencana tindak beserta indikator kinerja pengarusutamaan pembangunan (indikator *output*) yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing Kegiatan di dalam Bidang yang terkait.

LAMPIRAN BUKU I:

1. Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional: Prioritas, Fokus, dan Kegiatan Prioritas Nasional (beserta Indikator Kinerja Outcomes, dan Output);
2. Matriks Indikator Kinerja Pengarusutamaan Pembangunan.

LAMPIRAN BUKU I
RPJMN 2010-2014

TABEL 2.1
MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS NASIONAL

- PRIORITAS RPJM : Nama Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
- Visi/Goal : Pernyataan visi (goal) dari Prioritas dalam 1 kalimat.
 - Sasaran Pokok : Pernyataan sasaran prioritas yang utama (dampak yang diharapkan).
 - Indikator : Pernyataan Indikator Dampak dari pencapaian Prioritas Nasional

No.	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS				
				2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014
1.	FOKUS PRIORITAS 1		Indikator Outcomes						K/L Koord. Fokus Prioritas 1					
a.	Kegiatan Prioritas A		Indikator Output/ Keluaran Kegiatan Prioritas A						K/L X					
b.	Kegiatan Prioritas B		Indikator Output/ Keluaran Kegiatan Prioritas B						K/L Y					

2.2.2 OUTLINE BUKU II : PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG/ K-L

BAB I : BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1.1 Kondisi Umum

Merupakan gambaran perkembangan pembangunan Bidang sampai dengan saat ini disertai dengan capaiannya.

1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Bidang

Merupakan permasalahan Bidang yang akan dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, berdasarkan perkembangan sampai saat ini dan tantangan kedepan (perkiraan permasalahan yang menonjol di masa depan). Misalnya dalam bidang kesehatan, walaupun telah tercapai banyak kemajuan dalam Bidang kesehatan, namun tingkat kesehatan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai pendapatan sama. Tingkat kesehatan yang rendah akan mempengaruhi produktivitas yang pada gilirannya berpotensi menurunkan daya saing. Dengan demikian perlu ditetapkan sasaran dalam rangka memperbaiki permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Sasaran harus dilengkapi dengan Indikator capaian yang dalam hal ini adalah indikator dampak/*impact*.

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang

Arah kebijakan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir /kerangka kerja sebagai dasar penetapan Prioritas Bidang, Fokus Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Bidang (*policy structure*). Arah kebijakan yang ditempuh sangat tergantung kepada sasaran yang ingin dicapai. Arah kebijakan untuk penurunan Angka Kematian Ibu sebesar 10% akan berbeda dengan arah kebijakan untuk penurunan sebesar 50%.

Pada setiap Bidang diuraikan Prioritas Bidang dan Fokus Prioritas Bidang yang dilengkapi dengan Kegiatan Prioritas Bidang (dicantumkan dalam lampiran Matriks Bidang/Bab). Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian

Sasaran Pokok agenda pembangunan nasional yang dicanangkan dalam periode 5 tahun kedepan, dan sejauh mungkin bersifat Lintas Sektor/K-L (tingkat dampak/*impact*, merupakan perubahan kondisi yang diinginkan). Fokus Prioritas Bidang (dengan indikator *outcome*) adalah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian Sasaran Prioritas. Pencapaian Sasaran Fokus Prioritas didukung oleh Kegiatan Prioritas yang merupakan Kegiatan lintas K-L yang membutuhkan kordinasi. Kegiatan prioritas dilengkapi dengan indikator *output*.

Lampiran BAB 1: Matriks Rencana Tindak Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (Tabel 1.1):

- Fokus Prioritas (Indikator Outcome)
- Kegiatan Prioritas (Indikator Output)

BAB II : BIDANG EKONOMI

Lampiran BAB II: Matriks Bidang Ekonomi (Tabel 1.2)

BAB III : BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB IV : BIDANG SARANA DAN PRASARANA

BAB V : BIDANG POLITIK

BAB VI : BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BAB VII : BIDANG HUKUM DAN APARATUR

BAB VIII : BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

BAB IX : BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN BUKU II:

Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per-Kementerian/Lembaga :

- Semua Program/Kegiatan prioritas menurut K/L
- Kegiatan prioritas/besar dari K/L yang tidak masuk dalam lingkup kategori Bidang (Contoh: Bappenas).

TABEL 2.2
RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG

BIDANG PEMBANGUNAN :
PRIORITAS BIDANG :

No.	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS				
				2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1.	FOKUS PRIORITAS BIDANG A.1		Indikator Outcomes												
a.	Kegiatan Prioritas X		Indikator Output/ Keluaran Kegiatan Prioritas X						PROGRAM Kementerian/ Lembaga X	K/L X					
b.	Kegiatan Prioritas Y		Indikator Output/ Keluaran Kegiatan Prioritas Y						PROGRAM Kementerian/ Lembaga Y	K/L Y					

LAMPIRAN BUKU II
RPJMN 2010-2014

TABEL 2.3
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-KEMENTERIAN/LEMBAGA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
- Kementerian/Lembaga A														
1.	PROGRAM 1 - Kegiatan A (Prioritas Nasional) - Kegiatan B (Prioritas Bidang)		Outcome Program 1 - Output Kegiatan Prioritas A - Output Kegiatan Prioritas B											
2.	PROGRAM 2 - Kegiatan C (Prioritas Nasional) - Kegiatan D (Prioritas Bidang)		Outcome Program 2 - Output Kegiatan Prioritas C - Output Kegiatan Prioritas D											
- Kementerian/Lembaga B														
1.	PROGRAM 1 - Kegiatan E (Prioritas Bidang)		Outcome Program 1 - Output Kegiatan Prioritas E											

2.2.3 OUTLINE BUKU III : ASPEK PENGEMBANGAN WILAYAH

BAB I : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berisi penjelasan kondisi umum permasalahan pengembangan wilayah dari perspektif pembangunan nasional dan keterkaitan antar wilayah.

BAB II : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA

2.1 Kondisi Saat Ini

Memberikan gambaran mengenai potensi wilayah dan permasalahan/isu strategis lintas sektor/wilayah yang ada saat ini.

2.2 Permasalahan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Merupakan permasalahan wilayah yang akan dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kemudian, ditetapkan sasaran dalam rangka memperbaiki permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Sasaran harus dilengkapi dengan Indikator capaian yang dalam hal ini adalah indikator dampak/*impact*.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Menggambarkan arah kebijakan wilayah (*policy planning*) yang memuat strategi sebagai dasar penetapan arah pengembangan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah terdiri dari kerangka investasi dan kerangka regulasi terkait dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

BAB III : WILAYAH PULAU MALUKU

...sda.

BAB IV : WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA

BAB V : WILAYAH PULAU SULAWESI

BAB VI : WILAYAH PULAU KALIMANTAN

BAB VII : WILAYAH PULAU JAWA-BALI

BAB VIII : WILAYAH PULAU SUMATERA

LAMPIRAN BUKU III:

Matriks Rencana Tindak Program Lintas Bidang/KL dan Kegiatan Pokok per Wilayah Pulau (Kerangka Investasi dan Regulasi).

LAMPIRAN BUKU III
RPJMN 2010-2014

TABEL 2.4
RENCANA TINDAK PROGRAM LINTAS KL
PER WILAYAH PULAU*)

WILAYAH

Bidang/ Kegiatan prioritas	Kementerian/ Lembaga	Program	Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas*
Bidang A - Kegiatan A1 - Kegiatan A2 - Kegiatan A3			
Bidang B - Kegiatan B1 - Kegiatan B2 - Kegiatan B3			
Bidang C - Kegiatan C1			

* kumulatif 5 tahun (2010-2014)

2.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Penjelasan mengenai kaidah pelaksanaan akan dimasukkan ke dalam batang tubuh Peraturan Presiden yang mengatur tentang RPJMN 2010-2014. Kaidah Pelaksanaan menjelaskan mekanisme pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dalam konteks reformasi perencanaan, penganggaran, dan restrukturisasi program pembangunan. Juga, disertai dengan penjelasan mengenai posisi RPJMN dalam hubungan horisontal pemerintah antar K-L dan vertikal dengan perangkat pemerintah daerah, serta kerangka koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan, termasuk peran dari masing-masing pelaku pembangunan. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dalam menjaga akuntabilitas pengendalian pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan dalam lingkup RPJMN 2010-2014 termasuk dalam lingkup penjelasan kaidah pelaksanaan.

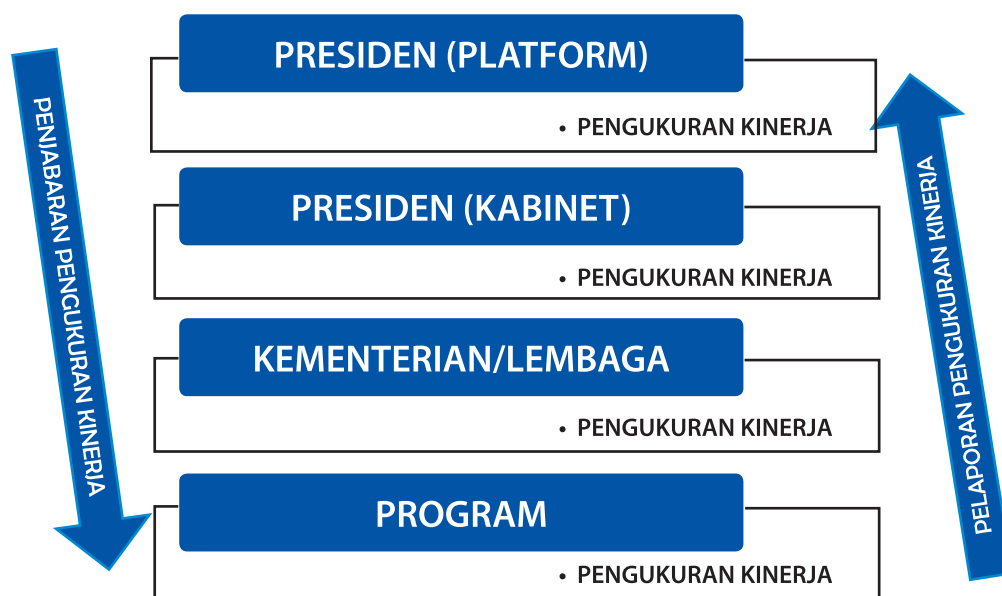
oooOOOooo

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMN 2010-2014

3.1 PENJELASAN UMUM

Reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja mengaitkan alokasi anggaran dengan hasil yang ingin dicapai. Hal ini untuk mendukung penerapan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pengelolaan hasil kerja (*results management*) dan pengukuran kinerja (*performance evaluation*) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.



Gambar 3.1
Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Sistem Pemerintahan
(Sumber: Dikembangkan dari dokumen The Performance Institute-USA, 2004)

Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.1 Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Sistem Pemerintahan, setiap Program haruslah mendukung pencapaian Sasaran dari Prioritas Nasional yang terkait, atau memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak (*impact*) dari suatu Prioritas Pembangunan Nasional. Untuk

memastikan akuntabilitasnya, Program merupakan penjabaran fungsi dari K-L dan setiap Program haruslah spesifik, dengan demikian menjadi tanggung-jawab Eselon 1 K-L penggunaannya. Koordinator suatu Fokus Prioritas yang bersifat lintas K-L bertanggung-jawab dalam menjaga keterkaitan (*alignment*) antara kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional, dan memastikan pelaporan informasi pencapaian kinerja dari Fokus Prioritas yang bersifat lintas K-L. Namun akuntabilitas setiap Kegiatan dalam Program K-L berada pada K-L induknya masing-masing.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dari pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan, dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan berikutnya. Kementerian Negara PPN/Bappenas mengkoordinasikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan dalam lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Lingkup kerangka kerja dan jadwal-waktu evaluasi kinerja pembangunan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Bagian yang terpenting dari dokumen rencana pembangunan yang akuntabel adalah indikator kinerja yang relevan, tepat, dan adanya perumusan capaian kinerja atau sasaran yang direncanakan. Pelaksanaan rencana pembangunan akan lebih efisien dan efektif keberhasilannya apabila dilengkapi dengan indikator capaian, pengukuran kerjanya, serta kepastian akuntabilitas dari pelaksanaannya. Konsistensi, koherensi dan ketepatan dari penetapan perumusan indikator capaian kinerja harus dijaga sesuai dengan hirarkinya, dimulai dari indikator dampak, *outcomes*, *output*, serta input sumber daya pendukungnya. Bagian ini merupakan tahap penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan (*policy planning*). .

3.2 KRITERIA INDIKATOR KINERJA

3.2.1 INDIKATOR KINERJA YANG *SMART*

Indikator adalah variabel kuantitatif atau kualitatif yang memudahkan dalam pengukuran pencapaian kemajuan atau perubahan yang terjadi akibat dari suatu intervensi yang dilakukan. Selanjutnya, indikator digunakan untuk mengukur kinerja (kualitas kerja) suatu organisasi terhadap pencapaian hasil-hasil yang direncanakan. Indikator yang baik haruslah bersifat: (1) *realistis*, data mudah didapatkan dalam arti tidak mahal dan tidak sukar mendapatkannya; dan (2) *relevan*, mempunyai keterkaitan yang jelas dengan subjek yang diukur dan bersifat objektif dalam mengukur pencapaian.

Secara lengkapnya, indikator yang baik harus memiliki unsur SMART dibawah ini:

TABEL 3.1
MERUMUSKAN INDIKATOR YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Specific (spesifik/khusus)	<ul style="list-style-type: none">Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses untuk mendapatkannya.
Measureable (Terukur)	<ul style="list-style-type: none">Indikator yang dapat terukur baik secara kuantitatif atau kualitatif.
Atributeable (or Accountable) (Dapat Dipertanggungjawabkan)	<ul style="list-style-type: none">Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.
Result-oriented (Relevan)	<ul style="list-style-type: none">Relevan /terkait langsung dengan Program/Kegiatan yang diukur.Uji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai atau tidaknya sasaran strategis dari suatu Program/Kegiatan akan dapat diketahui.
Time-bound (Periode Waktu Tertentu)	<ul style="list-style-type: none">Memperhitungkan rentang atau periode waktu pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya.

(Sumber : Dikutip dari Pedoman Manajemen Kinerja, Inspektorat Utama, Bappenas, 2006)

3.2.2 INDIKATOR KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Indikator kinerja dapat berupa indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Masing-masing indikator mempunyai maksud penggunaan yang berbeda, tergantung dari tujuan pengukuran yang dilakukan. Manajemen sektor publik mempunyai kepentingan tidak hanya berkaitan dengan dokumentasi suatu *progress*/kemajuan secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Indikator kualitatif membantu memberi informasi tentang apa yang telah tercapai dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini akan memberikan informasi yang lebih baik bagi keputusan strategis dalam perencanaan dan penganggaran sumber-daya input.

Indikator yang bersifat kuantitatif lazimnya berupa angka. Indikator yang bersifat kualitatif menyatakan penilaian yang bersifat kualitatif, misalnya pernyataan perubahan yang terjadi pada proses kelembagaan, sikap, kepercayaan, motivasi, maupun tingkah laku dari individu. Indikator kualitatif mengukur persepsi (misalnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat tertentu), atau dapat juga pernyataan gambaran tingkah laku (misalnya tingkat penguasaan dari suatu kegiatan pelatihan).

Sebagai contoh, pada pengukuran kinerja pelaksanaan pengarusutamaan “Gender” di masyarakat, indikator kuantitatif yang “sensitif gender” digunakan untuk mengukur jumlah atau persentase laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan (indikator kuantitatif ditabulasi menurut laki-laki/perempuan). Namun demikian, indikator kualitatif juga dibutuhkan, karena kita ingin mengetahui tidak saja jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan (misal jumlah perempuan di legislatif), tetapi juga kualitas partisipasi dan peran mereka di dalam kegiatan tersebut.

Data kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan, mengukur dan menyaringnya terutama pada tahap awal pengukuran dilakukan. Selain itu, indikator kualitatif relatif lebih sulit untuk diverifikasi karena indikator tersebut mengandung unsur pertimbangan subyektif. Perubahan secara kualitatif, misalnya “persepsi” peran aktif wanita dapat terukur apabila tersedia *baseline* data. Sebagai contoh: 30% perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislative pada akhir periode pengamatan, merupakan keberhasilan dalam meningkatkan “persepsi” peran aktif wanita dibandingkan dengan hanya 10% pada awal periode (*baseline*).

3.2.3 INDIKATOR PROKSI

Dalam mengukur pencapaian *outcome*, seringkali tidak dapat diperoleh data yang tepat untuk digunakan dalam mengukur suatu *outcome*. Hal ini terjadi apabila data dari indikator yang dicari, tidak tersedia atau membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan Indikator Proksi (Proxy). Contoh: (1) karena sulitnya melakukan survey kemiskinan untuk seluruh rumah-tangga untuk seluruh keluarga miskin, maka dilakukan pendekatan dengan mengamati kualitas rumah tinggal mereka, (2) penggunaan tingkat pendidikan sebagai prediksi kualitas pekerja.

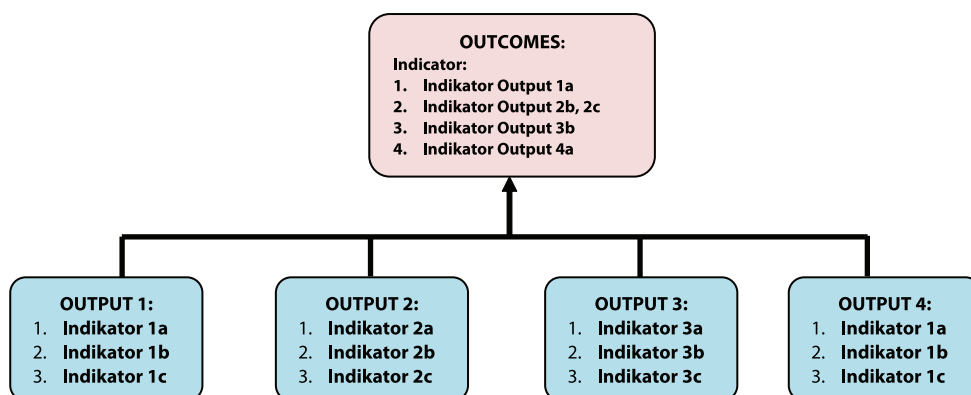
3.3 PENDEKATAN PENENTUAN INDIKATOR KINERJA

3.3.1 LOGIKA BERPICIR INDUKTIF

Secara sederhana, indikator kinerja pada hirarki yang lebih tinggi, dapat dirumuskan dari indikator-indikator kinerja hirarki di bawahnya. Sebagai contoh, Indikator *Outcome* merupakan resultan dari berbagai output kegiatan-kegiatan Prioritas untuk mengukur pencapaian suatu sasaran Fokus Prioritas atau Program. Dengan demikian, indikator *outcomes* dapat ditentukan melalui pendekatan hubungan antara output yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Fokus Prioritas atau Program. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

A. Menetapkan Indikator *Outcome* dari *Output* Terpenting

Indikator *Outcome* yang ditetapkan dengan menggunakan beberapa indikator output kegiatan terpenting:



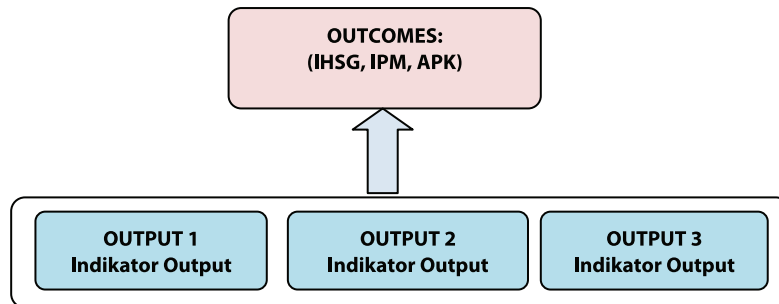
Gambar 3.2

Indikator Outcome Adalah Beberapa Indikator Output Terpenting

(sumber: Bahan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas 2009)

B. Indikator Outcome dari Data Primer/Sekunder

Indikator *Outcome* dapat ditetapkan dengan menggunakan besaran yang diperoleh melalui survey tersendiri. Indikator dari data sekunder dalam hal ini dapat digunakan indikator yang sudah tersedia/dirumuskan secara independen oleh Kementerian/Lembaga, organisasi, atau Badan Internasional untuk pembangunan. Misal survey Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Partisipasi Kasar (APK). Besaran indikator tersebut diperoleh dari kantor statistik nasional atau kementerian/lembaga yang bertanggung-jawab.



Gambar 3.3

Indikator Outcomes dalam Bentuk Data Sekunder Hasil Survey/Indeks
(sumber: Bahan dari Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas 2009)

Berbagai lembaga Internasional yang mempunyai indikator dan dapat menjadi referensi, antara lain: (1) Laporan-laporan pencapaian MDGs, (2) UNDPs Human Development Index, target Pembangunan Manusia Berkelanjutan (*Sustainable Human Development Goals*), (3) *World Bank Report*, misal: *Handbook Pembangunan Pedesaan*, dan (4) IMF, *Financial Soundness Indicators*.

3.3.2 LOGIKA BERPIKIR DEDUKTIF

Perumusan pernyataan keluaran dari Kegiatan-Kegiatan pokok yang mendukung suatu Fokus Prioritas atau Program dapat dilakukan dengan pendekatan logika berpikir deduktif. Alur berpikir dimulai dari penetapan hasil/*outcomes* dari Fokus Prioritas atau Program (apa manfaat/perubahan yang ingin dicapai), disertai dengan penentuan sasaran (pengukuran) dan indikator outcomes yang direncanakan. Kemudian, jabarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan

perubahan dalam pencapaian hasil/*outcomes* yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut merupakan kondisi logis yang spesifik saat ini dihadapi, identifikasi strateginya dapat dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, dan Ancaman).

Selanjutnya, jabarkan hasil/*outcome* dari masing-masing tahap perubahan tersebut beserta indikatornya. Tentukan *output* (apa yang harus diproduksi/dikeluarkan) untuk menghasilkan perubahan dari masing-masing tahap tersebut, dan tetapkan indikator outputnya. Berdasarkan hal tersebut, tentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memproduksi *outputs* tersebut.

3.4 PENJELASAN STRUKTUR KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KINERJA

Komponen dan langkah-langkah perumusan arah kebijakan pembangunan yang terdiri dari Fokus Prioritas/ Program dan Kegiatan beserta pernyataan sasaran yang diharapkan (dari *outcomes* atau *output*) beserta indikatornya, dapat dirumuskan dengan:

1. Menentukan pernyataan sasaran pembangunan (perubahan) yang diinginkan:
 - a. Sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan baik itu *outcomes* dari suatu Fokus Prioritas/Program atau keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan.
 - b. Pernyataan sasaran berupa pernyataan positif, yang menyatakan map dan arah kinerja yang akan dituju, dan hasil spesifik yang harus dicapai dan dapat diukur.
 - c. Sasaran hanya menyebutkan apa dan kapan, tidak menyebutkan kenapa dan bagaimana mencapainya. Bagaimana cara mencapainya akan dijelaskan dalam Strategi dan Kebijakan yang diambil.
 - d. Pencapaian sasaran haruslah jelas siapa yang bertanggung-jawab pada implementasi, untuk menghindari kekaburan akuntabilitas atau adanya akuntabilitas ganda.
2. Menentukan pernyataan hasil/*outcomes* yang diharapkan dari suatu Fokus Prioritas atau Program:
 - a. Apa esensi (objektif/tujuan utama) dari Fokus Prioritas atau Program yang



- dibutuhkan;
- b. Tentukan Kriteria Sukses dari Fokus Prioritas atau Program: Bagaimana kita tahu bahwa suatu Fokus Prioritas atau Program sudah mencapai sukses/hasil yang diharapkan.
 - c. Merupakan pernyataan nilai manfaat suatu Fokus Prioritas atau Program.
 - d. Menjelaskan secara singkat manfaat dari Fokus Prioritas atau Program tersebut bagi masyarakat/ *beneficiaries*.
3. Merumuskan indikator kinerja dimulai dengan mengurai sukses kriteria setiap tahap pencapaian pembangunan (*output, outcome, dampak*). Kriteria sukses adalah pernyataan keberhasilan pencapaian sasaran dalam rangkaian tahapannya, baik itu pada tingkat kegiatan, Fokus Prioritas/Program atau Prioritas dari perspektif seluruh *stakeholders* (apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, mengapa). Klarifikasi ini diperlukan untuk menghindari:
- c. Penggunaan indikator yang mengukur hal tidak relevan;
 - d. Terlewatkan / tidak teridentifikasinya permasalahan yang penting;
 - e. Pemilihan *outcome* yang terlalu umum sehingga bisa disalah-artikan.

Contoh penyusunan struktur kebijakan dan indikator kinerjanya yang disertai dengan langkah-langkah seperti dijelaskan di atas dapat dilihat pada lampiran buku pedoman ini.

oooOOOooo

LAMPIRAN

Tabel L-1: Matriks Struktur Kebijakan, Kriteria Keberhasilan & Indikator Kinerja RPJM Nasional

	Uraian	Kriteria Sukses (Pencapaian Target)	Indikator Kinerja
<p>PRIORITAS BIDANG</p> <p><i>Sasaran Prioritas</i></p> <p>Dampak/ Impacts</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<p>“Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB • Kontribusi ekspor non migas terhadap Produk Nasional Bruto meningkat • Peningkatan Pendapatan Petani • dst. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Kontribusi ekspor Pertanian thdp PDB% . ▪ Petumbuhan ekspor non-migas sekitar%; ▪ Meningkatnya Nilai Tambah Petani (NTP) ...% ▪ dst 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase Ekspor Pertanian (secara luas) terhadap PDB. ○ Persentase Ekspor Non-Migas. ○ Angka NTP. ○ dst
<p>FOKUS PRIORITAS BIDANG :</p> <p><i>Sasaran Fokus Prioritas Bidang :</i></p> <p>Outcomes <i>(perubahan pada target group --nelayan/ masyarakat pedesaan nelayan—perubahan yang diakibatkan langsung oleh output yang dihasilkan)</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kapasitas Nelayan ; • Meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi wilayah melalui jalan darat; • Meningkatnya produktivitas ikan hasil tangkap; • Meningkatnya jenis, volume dan nilai produk ekspor ikan tangkap olahan; • dst 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % Nelayan yang lulus simulasi ; ▪ Volume transit antar wilayah untuk kegiatan ekonomi pedesaan nelayan; ▪ 15 juta ton/tahun ikan tangkap mulai 2012; ▪ 10 jenis produk ikan tangkap olahan, dengan nilai ekspor US\$ 5 milyar/ pertahun mulai 2012; ▪ dst 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah workshop Simulasi penggunaan metode dan peralatan modern; ○ Jumlah kontainer trucks yang melintas unit jalan antar wilayah pedesaan nelayan; ○ Jumlah ikan tangkap segar ; ○ Jumlah jenis produk ikan tangkap olahan ○ Nilai ekspor ikan tangkap olahan ○ dst

	Uraian	Kriteria Sukses (Pencapaian Target)	Indikator Kinerja
<p>Outputs</p> <p><i>(Keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan prioritas melalui pendanaan pemerintah-RKP)</i></p> <p style="text-align: center;">4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Training ▪ Tersedianya Pelabuhan Perikanan • Terbangunnya infrastruktur Jalan antar wilayah pedesaan • Tersedianya Terminal kontainer • dst 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 119,600 nelayan mengikuti training tahap I pd akhir tahun 2010; ▪ 111 Pelabuhan Perikanan Tambat sesuai standard selesai pada 2010; ▪ 222 Km jalan yang menghubungkan 111 desa dengan kota terdekat selesai pada 2010; ▪ 111 terminal kontainer terbangun pada 2010; ▪ dst 	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah nelayan yang mengikuti dan meningkat pengetahuannya; o Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dapat terbangun sesuai waktu; o Km jalan yang terbangun sesuai waktu; o Jumlah terminal kontainer yang terbangun sesuai waktu. o dst
<p>Kegiatan Prioritas Bidang</p> <p><i>(Kegiatan Pokok Lintas Bidang)</i></p> <p style="text-align: center;">3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi dan promosi perlunya pengembangan ekspor melalui kerjasama antara Pemerintah, Pelaku usaha dan Nelayan; • Penyelenggaraan training untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan para nelayan; • Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang berkualitas; • Pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah pedesaan nelayan; • Pembangunan Terminal kontainer • dst 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan sosialisasi dan promosi 33 kali pada pameran pembangunan disetiap propinsi; ▪ Jumlah dan frekuensi tertentu pelaksanaan training, lokasi dan waktu yang telah ditentukan; ▪ % Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan ▪ % penyelesaian pembangunan jalan ▪ % penyelesaian pembangunan terminal kontainer ▪ dst 	<ul style="list-style-type: none"> o Frekwensi sosialisasi dan promosi ; o Frekwensi dan jumlah peserta training; o Pembangunan Pelabuhan Perikanan sesuai waktu; o Terlaksananya pembangunan jalan sesuai waktu; o Terlaksananya pembangunan terminal kontainer o dst
<p>Inputs</p> <p><i>Antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - DanaPemerintah (melalui pagu RKP dan sumber pendanaan lainnya) - SDM - Management dll <p style="text-align: center;">2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dana untuk peningkatan institusi; • Jumlah dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur seperti Pelabuhan Perikanan tambat, jalan dan terminal; • Jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya training atau capacity building bagi nelayan; • Pelatih yang kompeten untuk kegiatan training; • Jumlah dana yang dialokasikan untuk membangun Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan pelatih yang kompeten; ▪ Ketersediaan dana untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; 	<ul style="list-style-type: none"> o Dana untuk menyempurnakan peraturan o Dana untuk membangun jalan o Dana untuk training o Jumlah pelatih yang kompeten o Dana untuk membangun Pelabuhan Perikanan

	Uraian	Kriteria Sukses (Pencapaian Target)	Indikator Kinerja
<p><i>Identifikasi Permasalahan</i></p> <p>1</p>	<p>Kegiatan ekonomi kawasan pedesaan nelayan yang rendah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas ekonomi stagnan 2. Pendapatan nelayan rendah <p>Beberapa penyebabnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Modal; 2. Terbatasnya prasarana infrastruktur; 3. Kekurangan pengetahuan dan ketrampilan Nelayan. 		





